

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai bangsa yang multikultur ternyata belum berhasil melakukan internalisasi nilai kedamaian yang terlihat dari masih mengemukanya berbagai gejolak sosial di masyarakat. Hal tersebut jika dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas ditambah dengan ketidakmampuan mengelola keberagaman mendorong terjadinya gejolak sosial, seperti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan disintegrasi di beberapa wilayah. Satu contoh kasus pelanggaran HAM, dari tanggal 1 Januari 1961 sampai 26 Nov 2015 dalam ranah kesetaraan dan non-diskriminasi 13 kasus, kebebasan beragama dan berkeyakinan 108 kasus, hak atas hidup 231 kasus dan perbudakan 5 kasus (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2015). Dalam kasus pelanggaran HAM terdapat masalah dimana antar individu tidak bisa saling menghargai satu sama lain. Kemudian dalam kasus lain, kita bisa melihat berbagai macam konflik yang terjadi, seperti konflik antara warga Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah, yang berkembang menjadi konflik antar etnis. Dalam waktu seminggu, jumlah korban yang tewas dari etnis Madura tercatat 315 orang. Konflik Sampit telah menambah panjang daftar konflik yang bernuansa SARA di tanah air (Mahmud, 2006, hlm 119).

Konflik juga terjadi di Aceh selama hampir 30 tahun, ironisnya konflik tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar, namun juga disadari atau tidak berpotensi telah mengubah karakter masyarakat Aceh dari karakter masyarakat yang cinta damai menjadi masyarakat yang cinta kekerasan. Fenomena-fenomena di atas telah memberikan catatan-catatan dalam tinta hitam sepanjang perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercinta ini (Meiro, 2009).

Dalam level internasional, pendidikan digunakan sebagai pendekatan untuk mengurangi konflik dan kekerasan sesungguhnya sudah menjadi wacana terutama pendidikan perdamaian. PBB melalui UNESCO dan UNICEF sudah menggunakan pendidikan perdamaian sebagai respon kemanusiaan paska konflik untuk mengembalikan kondisi masyarakat paska konflik lebih berperilaku kepada perdamaian. Pendidikan terutama pendidikan perdamaian juga dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengikis dan meminimalisir gerakan ekstrimisme yang sekarang ini merambah ke kaum pemuda dan pemudi yang tidak memiliki pendidikan yang cukup tentang toleransi dan saling menghormati.

Hal ini telah disampaikan oleh Tony Blair Perdana Menteri Inggris dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada November 2014 yang mengatakan bahwa pendidikan sangatlah penting dalam menjaga perdamaian dunia (Blair : 2014). Perdana Menteri Blair juga mengungkapkan dengan melihat konflik-konflik jaman sekarang yang sangat berbeda dari sebelumnya, beliau juga menyatakan bahwa “*education is a security issue*” sehingga sudah seharusnya seluruh masyarakat di dunia memberikan perhatian yang lebih kepada pendidikan damai. Berangkat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan damai merupakan gerakan internasional yang sungguh sangatlah penting dalam mewujudkan perdamaian dunia secara internasional walaupun pelaksanaannya ada di daerah terpencil di suatu negara sekalipun sehingga apabila gerakan ini dilakukan secara bersama-sama oleh semua Negara, tentunya membawa kesempatan untuk mencapai perdamaian dunia lebih besar untuk terwujud (Blair, 2014).

UNICEF dan UNESCO selaku badan PBB sudah meletakkan pendidikan damai sebagai sebuah perhatian dalam membina perdamaian terutama dalam membina perdamaian di daerah konflik. UNICEF sendiri mempunyai program-program yang dikhususkan untuk pendidikan damai dalam bentuk informal dan formal. Pendidikan formal dimaksudkan disini merupakan pendidikan damai di sekolah-sekolah berbasis perdamaian atau sekolah-sekolah yang sedang dalam tahap memasukan unsur-unsur perdamaian dengan pengembangan sistem

pendidikan, meningkatkan kondisi lingkungan sekolah dan mutu pengajarannya (Fountain, 1999). PBB melalui kedua badannya tersebut juga menekankan bahwa pendidikan damai berbeda dengan pendidikan pada umumnya dimana fokusnya bukan hanya belajar dan menghafalkan semata seperti halnya di konteks Aceh namun lebih dari itu bahwa pendidikan damai menekankan kepada bagaimana seorang generasi muda mampu membangun masa depan dan membuat dunia sekitarnya menjadi tempat yang lebih damai untuk ditinggali. Walaupun pendidikan damai bermula dari gerakan komunitas internasional namun praktisi perdamaian di bidang pendidikan pada dewasa ini meluaskan jangkauan praktek pengajarannya melewati batasan-batasan wilayah serta tidak hanya fokus pada isu-isu perdamaian internasional namun mencoba merengkuh subyek-subyek yang signifikan di dalam dimensi-dimensi domestik seperti pendidikan demokrasi, Hak Asasi Manusia dan kewarganegaraan. (Fitzduff dan Isabella, 2011, hlm. 7).

Dalam tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraann secara pragmatik memiliki visi socio-pedagogis untuk mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, antara lain mencakup konteks pendidikan formal dan non-formal. Sedangkan secara umum Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi formal-pedagogis untuk mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal. Di Indonesia PKn memiliki visi formal-pedagogis, yakni sebagai mata pelajaran sosial dalam dunia persekolahan dan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai wahana untuk mendidik warganegara Indonesia yang Pancasila, singkatnya Pendidikan Kewarganegaraan melakukan pembinaan keadaban kewarganegaraan dalam bidang sosial melalui prinsip-prinsip nilai demokrasi dan ideologi negara yang diajarkan melalui sekolah.

Lebih lanjut dalam tinjauan *Civic Education*, partisipasi warga negara dibentuk oleh elemen-elemen *civic knowledge*, *civic virtue*, *civic skill*, *civic disposition*, dan *civic commitment* (Branson dan Quigley, 1998, hlm. 5).

Zuhri Zurgobban, 2016

**PEMBINAAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC VIRTUE) DALAM BIDANG SOSIAL MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DAMAI (PEACE EDUCATION) PADA KOMUNITAS PEACE GENERATION DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Paradigma *Civic Education* ala civitas internasional dan *center for Civic Education* juga menitikberatkan pada pengembangan *civic virtue* dan *civic culture* (Budimansyah dan Suryadi, 2008, hlm. 22). Keadaban kewarganegaraan atau *civic virtue* di bidang sosial yang mengalami kemerosotan ditandai dengan semakin banyaknya kekerasan, kerusuhan dan konflik. Kondisi ini membutuhkan alternatif solusi yang mengikutsertakan semua komponen masyarakat. Program *peace education* yang dilakukan oleh komunitas *Peace Generation* merupakan contoh sederhana bagaimana warga negara semestinya memberikan partisipasinya dalam bentuk kepedulian terhadap masalah sosial.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk membahas dan meneliti mengenai pembentukan kesadaran sosial melalui program pendidikan damai pada komunitas *Peace Generation*. Penelitian ini penting dilakukan karena peneliti setidaknya didukung oleh beberapa alasan argumentatif, yaitu a) Persoalan sosial lebih disebabkan oleh peran manusia yang gagal menjalin hubungan baik dan selaras dengan manusia lainnya. Padahal kehidupan sosial yang harmonis seperti memiliki sifat toleransi, saling menghormati, solidaritas dan hidup dengan penuh kasih sayang merupakan cita-cita setiap orang. b) Program-program dari pemerintah dirasakan belum optimal karena hanya bersifat sentralistik dan vertikal tanpa tercukupinya peran serta masyarakat. Hal ini memerlukan partisipasi non pemerintah secara mandiri untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan sosial tanpa menunggu peran pemerintah yang terbatas; dan c) Program pendidikan damai dapat dijadikan model alternatif sebuah pendidikan di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung sehingga kondisi perkotaan yang rawan konflik akibat kemajemukannya dapat terminimalisir dengan baik.

Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Pembinaan Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*) dalam Bidang Sosial melalui Program Pendidikan Damai (*Peace Education*) Pada Komunitas *Peace Generation* di Kota Bandung”**.

Zuhri Zurgobban, 2016

**PEMBINAAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN (*CIVIC VIRTUE*) DALAM BIDANG SOSIAL MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DAMAI (*PEACE EDUCATION*) PADA KOMUNITAS *PEACE GENERATION* DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## B. Identifikasi Masalah

Berdasar latar belakang masalah diatas, maka untuk membatasi penelitian ini maka peneliti memiliki indentifikasi masalah yang dapat dikemukakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor pelanggaran HAM yang terjadi merupakan salah satu sikap antar individu yang tidak bisa saling menghargai satu sama lain.
2. Konflik yang bernuansa SARA merupakan salah satu bentuk ketidakberadaban warganegara dalam bidang sosial.
3. Kurangnya sinergi antara berbagai pihak dalam usaha menciptakan keadaban kewarganegaraan dalam bidang sosial, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri
4. Kurangnya kesadaran bahwa pendidikan damai merupakan salah satu jalan untuk terciptanya masyarakat yang beradab.
5. Konsep Pendidikan Damai di Indonesia belum bisa diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal.

## C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum rumusan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pembinaan keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*) di bidang sosial melalui program pendidikan damai (*Peace Education*) di komunitas *Peace Generation* kota Bandung?

Agar lebih terarah dan terfokus, maka rumusan masalah di atas dapat dikembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana input pendidikan damai yang dimiliki oleh komunitas *Peace Generation* di kota Bandung?
2. Bagaimana proses pendidikan damai yang dilakukan komunitas *Peace Generation* di kota Bandung?

Zuhri Zurgobban, 2016

**PEMBINAAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC VIRTUE) DALAM BIDANG SOSIAL MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DAMAI (PEACE EDUCATION) PADA KOMUNITAS PEACE GENERATION DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana hasil pendidikan damai yang dilakukan oleh komunitas *Peace Generation* di kota Bandung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang pembinaan keadaban kewarganegaraan (*Civic Virtue*) dalam bidang sosial melalui program pendidikan damai (*Peace Education*) pada komunitas *Peace Generation* di kota Bandung.

##### **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menggali, mengkaji, mengorganisasikan informasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengkaji:

- a. Input pendidikan damai yang dimiliki oleh komunitas *Peace Generation* di Kota Bandung.
- b. Proses pendidikan damai yang dilaksanakan oleh komunitas *Peace Generation* di Kota Bandung.
- c. Hasil pendidikan damai yang dilakukan oleh komunitas *Peace Generation* di Kota Bandung.

#### **E. Penjelasan Istilah**

1. Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*) dalam bidang sosial

Definisi *civic virtue* (keadaban kewarganegaraan) ialah seperangkat keterampilan, watak, dan ciri karakter yang menghasilkan pribadi yang demokratis dengan komponen utamanya berhubungan dengan pengembangan warga negara demokratis (McClain, 2001, hlm. 1624). *Civic virtue* juga dapat diartikan sebagai penumbuh kembangan kebiasaan perseorangan yang dianggap penting untuk keberhasilan suatu komunitas. *Civic virtue* dalam

referensi lain merupakan istilah dalam filsafat politik, yaitu kualitas kepribadian yang diasosiasikan kepada peran efektif warga negara dalam kehidupan politik atau penjagaan terhadap nilai-nilai atau prinsip-prinsip publik (Encyclopedia Britania online). Diskusi tentang *civic virtue* lebih banyak mengenai peran warga negara di area publik sebagai dukungan mereka kepada negara, setidaknya seperti dengan membayar pajak. Dari uraian tersebut keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) dalam bidang sosial adalah moralitas atau standar perilaku yang benar mengenai keterlibatan warga negara dalam masyarakat, mengenai hak dan kewajiban dalam lingkup masyarakat yang berdasarkan prinsip nilai-nilai demokrasi dalam kaitannya dengan pengertian tersebut dapat ditarik indikator keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) dalam bidang sosial antara lain : Toleransi, Anti kekerasan, Solidaritas, Menghargai Hak Asasi Manusia, Hidup dengan adil dan penuh kasih sayang, Hidup dengan budaya damai.

## 2. Pendidikan Damai

Pendidikan damai pada dasarnya merupakan salah satu strategi krusial yang dikerahkan dalam periode peacebuilding dan juga cara yang efektif untuk mencegah konflik (Novarro-Castro & Nario-Galace, 2008, hlm. 21). UNICEF secara khusus mendefinisikan pendidikan damai sebagai sebuah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap atau tindakan dan nilai yang diperlukan untuk mengubah perilaku anak-anak, pemuda, dan orang dewasa untuk mencegah konflik secara damai, serta menciptakan suasana kondusif bagi perdamaian, baik pada level pribadi, antar pribadi, antar kelompok, nasional ataupun internasional (Fountain, 1999, hlm. 1)

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Segi Teori

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan, menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi seputar program *Peace*

*Education* sebagai pembinaan keadaban warga negara di bidang sosial guna memberikan pengembangan bagi keilmuan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) secara sosio-kultural. Diharapkan kajian PKn mendapatkan nilai tambah dari proses bottom up gerakan sosial yang mencerminkan peran dan partisipasi positif warga negara.

## 2. Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai konsep pendidikan guna membangun keadaban di bidang sosial dengan membangun dan mengembangkan kesadaran terhadap bidang sosial bagi warga negara. Sehingga program *Peace Education* yang pada awalnya sebagai gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok sosial dalam masyarakat menjadi gerakan bersama yang terstruktur, bersinergi, dan mendapatkan dukungan dari segenap pihak dan lintas sektoral. Dengan kepedulian terhadap keadaan sosial yang semakin tumbuh dalam masyarakat melalui gerakan *Peace Education* sebagai gaya hidup (*life style*) menjadi solusi terhadap persoalan bersama yaitu kekerasan dan kerusuhan.

## 3. Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a. Para pengembang kurikulum PKn dan sosial, terutama tambahan muatan isi pendidikan karakter dengan menjalin keterpaduan konsep dan praktek pendidikan sosial pada peserta didik dan masyarakat.
- b. Peneliti lanjutan, sebagai bahan informasi dan perbandingan agar dikembangkan konsep dan teori lain untuk meningkatkan peran pendidikan bagi upaya menciptakan budaya damai.

## 4. Segi Isu dan Aksi Sosial

Secara isu dan aksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut:

- a. Pada masyarakat umum, sebagai bahan refleksi dan motivasi untuk mengambil peran aktif dalam upaya menciptakan budaya damai. Selain manfaat di bidang sosial, melalui kegiatan *Peace Education* juga memiliki dampak positif dalam mempererat relasi sosial dalam masyarakat.
- b. Para akademisi, praktisi pendidikan, aktivis sosial, dan tokoh masyarakat, sebagai bahan kontribusi konsep dan paradigma budaya damai, pengembangan pendidikan, dan pelatihan budaya damai dengan mengikutsertakan peran aktif warga negara atau masyarakat.
- c. Pejabat pemerintah, terutama Pemerintah Kota Bandung, agar memberikan dukungan baik materiil maupun nonmateriil terhadap program-program yang diinisiasi oleh perorangan maupun kelompok yang berguna bagi keadaan damai di perkotaan.

## G. Struktur Organisasi Tesis

Pada penelitian yang penulis lakukan, agar alur penulisan lebih mudah dipahami dan jelas, maka tesis yang akan disusun memiliki sistematika sebagai berikut:

Metode dan teknik penelitian, teknik pengumpulan data, tahap penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan subjek penelitian, dan sistematika penelitian

Bab *pertama*, latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi konseptual, manfaat/signifikansi penelitian,. Bab *kedua*, memuat dan mengkaji tentang kajian pustaka mengenai keadaban kewarganegaraan dalam bidang sosial, pendidikan damai, penelitian terdahulu, posisi peneliti dan posisi studi.

Bab *ketiga*, memuat tentang pendekatan penelitian yang menggunakan kualitatif, jenis penelitian studi kasus (*case study*), subjek dan objek penelitian yaitu komunitas *Peace Generation* yang terdiri dari pengurus, anggota dan peserta program pendidikan dama komunitas *Peace Generation*, tehknik pengumpulan

data berupa wawancara dengan pedoman wawancara, observasi dengan daftar tilik dan analisis dokumen, tehnik analisis data dan keabsahan data yang menggunakan triangulasi data.

Bab *keempat*, merupakan hasil temuan dan pembahasan penelitian meliputi deskripsi penelitian, bentuk keadaban kewarganegaraan dalam bidang sosial melalui input pendidikan damai, proses pendidikan damai dan hasil dari program pendidikan damai.

Bab *kelima*, merupakan penutup yakni mengenai simpulan baik umum dan khusus, implikasi serta rekomendasi.